

**ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI SIMGAJI PADA  
BADANPENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Salmah Khaerunisa

NIM. 49402100046

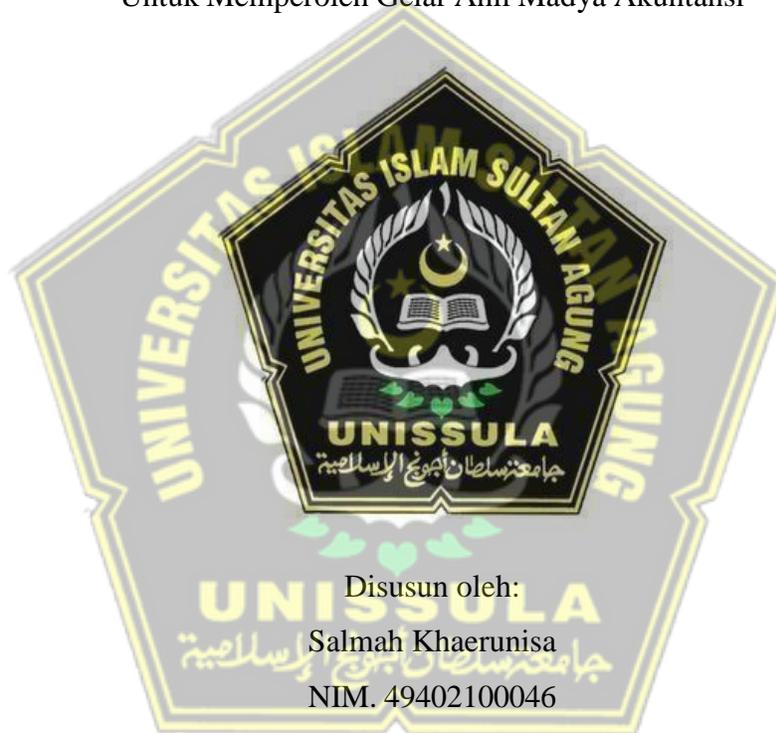
**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI SIMGAJI PADA BADAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh:

Salmah Khaerunisa

NIM. 49402100046

**PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmah Khaerunisa

NIM : 49402100046

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI SIMGAJI PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH”**

merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 4 Februari 2024

Yang Menyatakan,

  
  
MEZERA  
TEMPEL  
63AAJX052706253  
( Salmah Khaerunisa )

NIM. 49402100046

## HALAMAN PENGESAHAN

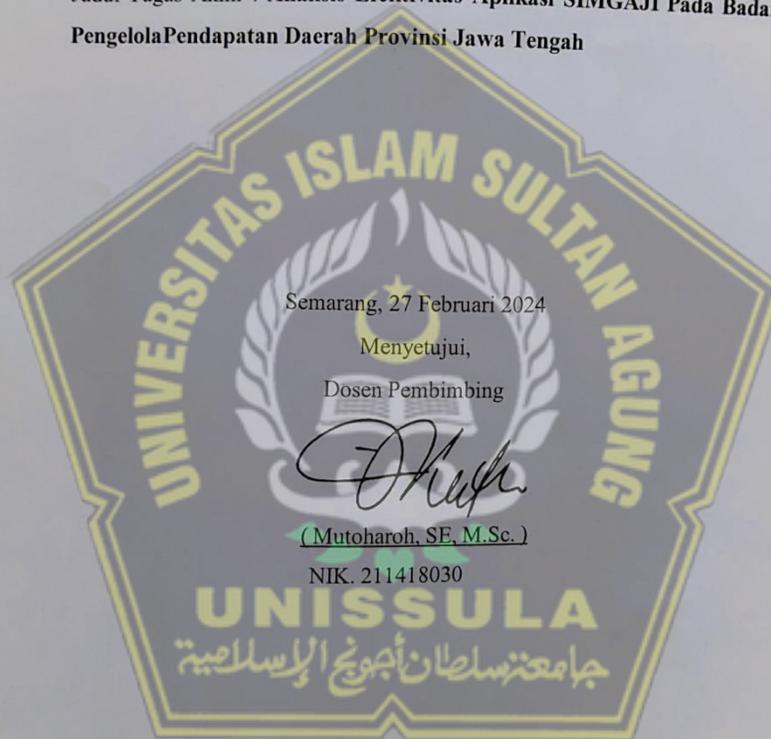
Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Salmah Khaerunisa

NIM : 49402100046

Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : **Analisis Efektivitas Aplikasi SIMGAJI Pada Badan  
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Salmah Khaerunisa  
NIM : 49402100046  
Program Studi : DIII Akuntansi

**Judul Tugas Akhir** : Analisis Efektivitas Aplikasi SIMGAJIPada Badan  
Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2,

  
(Mutoharoh, SE, M.Sc.)  
NIK. 211418030

Semarang, 4 Maret 2024

Penguji 1,

  
(Dr. Chrisna Suhedi, SE, M.BA., At.CA.)  
NIK. 210493034

Mengetahui,

Ketua Program Studi D-III

Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
(Ahfid Rudi Yudianto, SE, M.Si.Ak.)  
NIK. 210493028

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak.

Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan judul **“Analisis Efektivitas Aplikasi SIMGAJI Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah”** disusun untuk dapat memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya, program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Mutoharoh, SE., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan semangat kepada penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Hendri Setiawan, SE., M.PA selaku Dosen Wali yang telah membimbing selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Latif Adin selaku staf sub bagian keuangan bagian penggajian di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang membantu penulis dalam menyusun laporan tugas akhir.
6. Kepada kedua orang tua penulis Ibu Dakiroh dan Bapak Wamadi yang senantiasa tanpa henti memberikan dukungan penuh serta semangat melalui untaian restu dan do'a.
7. Kepada Saudara-saudara penulis Sadam Husen dan Rizki Nizar Saputro yang selalu hadir menjadi penyemangat penulis.
8. Kepada Nisa Riski Amalia dan Riskiatun Maulida selaku teman-teman dekat penulis semasa menjalani bangku perkuliahan yang memberikan semangat untuk penulis.
9. Kepada Saiful Anwar sebagai partner penulis, terima kasih atas ketersediaan waktu untuk menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih ada keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunannya, sehingga menimbulkan ketidaksempurnaan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan lebih lanjut, harapan penulis, bahwa hasil Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 2 Februari 2024

Penulis,



Salmah Khaerunisa



## ABSTRAK

Tugas akhir ini bertujuan menggambarkan analisis efektifitas penggunaan aplikasi SIMGAJI pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah. SIMGAJI adalah sistem aplikasi penggajian yang dibangun oleh PT Taspen (Persero) yang berfungsi untuk pengelolaan data gaji PNS daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui teknologi informasi yang dapat diakses dan terintegrasi dengan unit kerja lainnya serta dapat menyajikan data secara akurat, tepat, dan up to date.

Metode penelitian yang dilakukan secara deskriptif dalam memperoleh data dengan melalui pengamatan serta wawancara secara langsung dengan pihak BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang dimana selanjutnya dianalisis secara mendalam untuk memperoleh data riil di lapangan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kemudian dijabarkan kedalam laporan akhir ini. Selain itu sumber-sumber lain seperti jurnal-jurnal, *e-book*, web resmi, dan laporan tugas akhir sebelumnya.

Hasil pengamatan dan wawancara dalam analisis efektifitas pada aplikasi SIMGAJI yaitu sudah efektif dikarenakan dimana semula masih menggunakan sistem manual dan sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga mampu memberikan efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan penggajian pegawai BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci : Analisis SIMGAJI, Aplikasi SIMGAJI, Rangkap Jabatan**

## **ABSTRACT**

*This final assignment aims to describe an analysis of the effectiveness of using the SIMGAJI application at the Regional Revenue Management Agency (BAPENDA) of Central Java Province. SIMGAJI is a payroll application system built by PT Taspen (Persero) which functions to manage salary data for regional civil servants in the Provincial/Regency/City Government through information technology that can be accessed and integrated with other work units and can present data accurately, precisely and up to date.*

*The research method was carried out descriptively in obtaining data through direct observation and interviews with BAPENDA Central Java Province which was then analyzed in depth to obtain real data in the field. The results of the interviews conducted by the author were then described in this final report. Apart from that, other sources such as journals, e-books, official websites, and previous final assignment reports.*

*The results of observations and interviews in analyzing the effectiveness of the SIMGAJI application are that it is effective because previously it still used a manual system and now uses an application so that it is able to provide effectiveness and efficiency in the implementation of payroll for BAPENDA employees of Central Java Province.*

**Keywords: SIMGAJI Analysis, SIMGAJI Application, Multiple Positions**

## DAFTAR ISI

<b>ANALISIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Gambaran Umum Instansi .....	7
2.1.1 Sejarah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah .....	7
2.1.2 Visi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.....	9
2.1.3 Misi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.....	9
2.1.4 Fungsi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.....	10

2.1.5 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah .....	11
2.1.6 Struktur dan Tugas Sekretariat Subbagian Keuangan.....	13
2.2 Sistem Penggajian.....	14
2.3 Pengertian Efektivitas .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>19</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Objek Penelitian .....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	20
3.3.1 Jenis Data.....	20
3.3.2 Sumber Data .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Pembahasan.....	23
4.1.1 Cara Kerja Aplikasi SIMGAJI.....	23
4.1.2 Hasil Wawancara .....	26
4.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Aplikasi SIMGAJI.....	30
4.2 Hasil Pengamatan Mengenai Efektivitas Penggunaan SIMGAJI.....	32
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
5.1 Kesimpulan.....	36
5.2 Keterbatasan .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Bapenda .....	11
Gambar 4.1 Menu utama simgaji .....	23
Gambar 4.2 Tampilan setelah login .....	24
Gambar 4.3 Tampilan menu pegawai.....	25



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kartu Bimbingan .....	40



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena sistem informasi yang baik dapat membuat kegiatan operasional instansi menjadi efektif dan efisien. Salah satunya adalah sistem informasi akuntansi yang dapat membantu menghasilkan suatu informasi yang berguna, dapat dipercaya, lengkap dan tepat. Hall (2007:21) menyatakan tiga tujuan dasar sistem informasi yaitu mendukung fungsi penyediaan (stewardship) pihak manajemen, mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, mendukung operasional harian perusahaan. Jika sebuah instansi dapat menerapkan tujuan-tujuan tersebut dengan tepat maka akan dapat memperlancar kegiatan operasional instansi.

Pada instansi pemerintah, sistem informasi akuntansi memiliki fungsi yang krusial termasuk dalam pengelolaan informasi keuangan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini khususnya di bidang komputer, menjadikan sistem informasi akuntansi dijalankan secara terkomputerisasi.. Sistem informasi berbasis komputer tersebut saat ini telah banyak digunakan di berbagai unit instansi pemerintah. Dalam pemanfaatannya, sistem komputerisasi memberikan banyak kelebihan diantaranya sebagai penunjang aktivitas dan kreativitas sumber daya manusia sehingga memiliki kualitas yang baik

dan dapat menjadikan instansi pemerintah mempunyai kapabilitas yang tinggi.

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menunjang manajemen operasional yang baik, karena sumber daya manusia dalam suatu instansi merupakan faktor dominan dalam pencapaian tujuan instansi. Jika tidak ada sumber daya manusia, segala sumber daya yang tersedia tidak akan berjalan dengan lancar dan semestinya. Peran pegawai dalam sebuah instansi yaitu sebagai sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk menentukan kesuksesan sebuah instansi pemerintah, serta bertujuan untuk membantu mewujudkan produktivitas dan kinerja instansi. Pegawai dengan kesediaannya meluangkan tenaga, waktu, pikiran dan keterampilannya harus diapresiasi melalui imbalan jasa berupa gaji atau upah yang diberikan oleh instansi. Hall (2009:138) menyatakan upah adalah suatu imbalan dari perusahaan kepada pegawai untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dirampungkan dan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusia dan operasional perusahaan. Upah dinyatakan dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan berdasarkan suatu kontrak kerja antara perusahaan dengan pegawai. Maka, untuk menunjang kelancaran pemberian gaji kepada pegawai, instansi pemerintah membutuhkan sebuah sistem informasi yaitu disebut dengan sistem informasi akuntansi penggajian.

Sistem informasi akuntansi penggajian merupakan salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi yang terus mengalami kemajuan. Sistem informasi akuntansi penggajian mencakup hal-hal yang berhubungan dengan alur penggajian pegawai, meliputi pengelompokan gaji, fungsi-fungsi yang terkait dengan penggajian, prosedur-prosedur yang terkait dengan penggajian, dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang proses penggajian pegawai. Setiap perusahaan atau instansi diberi kebebasan dalam menerapkan suatu sistem informasi akuntansi penggajian yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yaitu bisa dengan sistem manual maupun berbasis komputer.

Salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan sistem informasi akuntansi penggajian adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah. Sistem tersebut diterapkan di BAPENDA untuk mengetahui daftar gaji maupun jumlah tunjangan pegawai, sehingga proses penggajian lebih efisien, mudah, dan akurat. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dan ketidakteraturan penggajian yang memicu kesalahpahaman antara instansi dengan pegawai, sehingga dampaknya akan menunjang kesejahteraan pegawai dan kapabilitas instansi.

Dalam berkembangnya teknologi dan informasi, masalah penggajian pegawai dapat dikelola dengan lebih mudah, efektif, efisien dengan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. Pelaksanaan sistem penggajian di BAPENDA Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan sebuah aplikasi bernama SIMGAJI

untuk mempermudah serta mengoptimalkan pelayanan dan pendistribusian gaji kepada pegawai. Aplikasi SIMGAJI merupakan sistem pengolahan penggajian Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan PT. Taspen (Persero). Sebelumnya, BAPENDA masih menggunakan mode manual dalam sistem penggajian pegawainya. Sebagaimana kelemahan sistem manual pada umumnya, berbagai masalah efisiensi dan efektivitas juga dihadapi oleh BAPENDA. SIMGAJI diklaim mampu memberikan efektivitas dalam pengelolaan penggajian. Menurut Ravianto (2014:11), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Pada implementasinya, SIMGAJI yang diterapkan pada BAPENDA selama pelaksanaannya masih memiliki kendala seperti kasus kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menunjukkan adanya kelemahan yang masih terdapat pada sistem informasi yang sebelumnya diharapkan menjadi solusi masalah efektivitas penggajian. dengan demikian, perlu dilakukan analisis untuk menilai apakah SIMGAJI telah memenuhi ekspektasi BAPENDA dalam pengelolaan penggajian atau mungkin lebih banyak malaha yang ditimbulkan dengan penggunaan sistem ini. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan studi lapang yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI SIMGAJI PADA BADAN**

**PENGELOLA PENDAPATAN PROVINSI JAWA TENGAH”**. Penyusunan tugas akhir dengan pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan memberikan masukan bagi instansi-instansi serupa maupun menjadi bahan evaluasi efektivitas bagi BAPENDA apabila ditemukan kelemahan tertentu pada penerapan aplikasi SIMGAJI tersebut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah :

Bagaimana Efektifitas Implementasi aplikasi SIMGAJI pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah sistem aplikasi SIMGAJI pada pengelolaan masalah penggajian pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah sudah dapat dikatakan efektif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritik**

Bagi bidang ilmu ekonomi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pada jurusan akuntansi yang secara teoritis telah di pelajari dibangku

perkuliahan. Dan bagi pembaca, menambah wawasan agar bisa mengetahui efektivitas penggunaan sistem aplikasi SIMGAJI dalam pendistribusian gaji pegawai pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Manfaat Praktik

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai efektivitas penggunaan sistem aplikasi SIMGAJI dalam pendistribusian gaji pegawai agar dapat meningkatkan efektivitas kinerja.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Gambaran Umum Instansi**

##### **2.1.1 Sejarah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah, instansi ini awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 5 Juli 1967 dengan Nomor KUPD/A36/I/15 tentang Kedudukan dan memiliki susunan Organisasi serta tugas pokok DISPENDA dan pada saat itu berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah, Lalu pada tahun 1981 DISPENDA mengalami perubahan struktur organisasi dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pada tahun 2001 DISPENDA mengalami perubahan struktur organisasi untuk kedua kalinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tahun 2008 Nomenklatur kelembagaan DISPENDA berubah dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) yang berdasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi DISPENDA. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

Pada tanggal 1 Januari 2017 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) berubah menjadi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pergub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.

Pada tanggal 22 Agustus 2019. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 061/44 Tahun 2019 akronim/ singkatan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengalami perubahan terkait dengan akronim dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang semula adalah BPPD berubah menjadi BAPENDA.

### **2.1.2 Visi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah**

Visi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”

Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

### **2.1.3 Misi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah**

Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

#### **2.1.4 Fungsi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah**

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;

5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.5 Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah



**Gambar 2.1 Struktur Bapenda**

Struktur Organisasi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi:
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak,
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain,
5. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan;
6. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan.



### 2.1.6 Struktur dan Tugas Sekretariat Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memiliki tugas yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan khususnya di bidang Keuangan.

#### A. Struktur Subbagian Keuangan

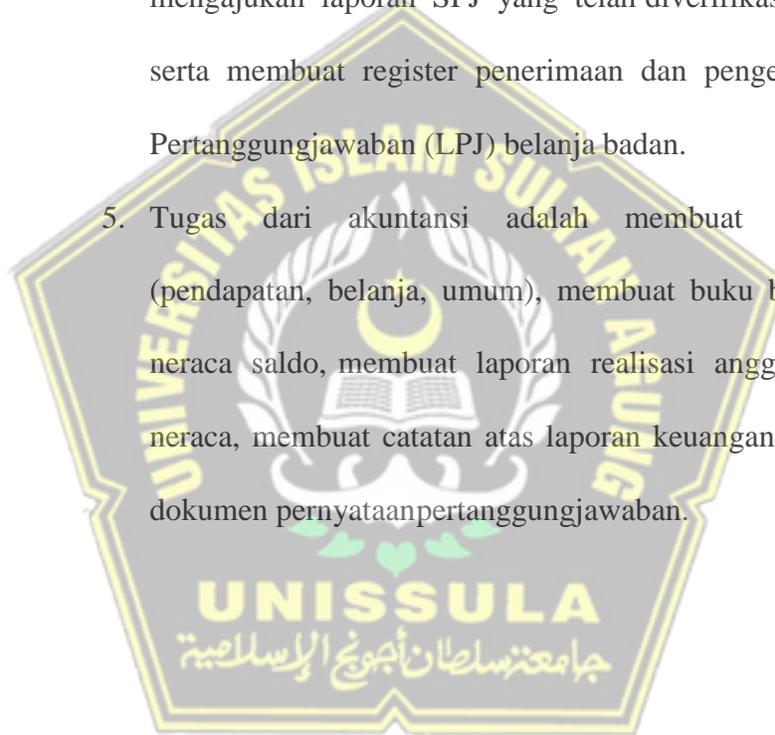
1. Bendahara Pengeluaran
2. Bendahara Penerimaan
3. Bendahara Gaji
4. Verifikasi
5. Akuntansi

#### B. Tugas Subbagian Keuangan Meliputi ;

1. Tugas dari bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja badan.
2. Tugas dari bendahara penerimaan adalah menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja badan.
3. Tugas dari bendahara gaji adalah memproses pembayaran gaji

pegawai.

4. Tugas dari verifikator adalah meneliti kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan dan pengeluaran rincian objek, menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran, mengajukan laporan SPJ yang telah diverifikasi kepada PKK serta membuat register penerimaan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belanja badan.
5. Tugas dari akuntansi adalah membuat jurnal khusus (pendapatan, belanja, umum), membuat buku besar, membuat neraca saldo, membuat laporan realisasi anggaran, membuat neraca, membuat catatan atas laporan keuangan serta membuat dokumen pernyataan pertanggungjawaban.



## **2.2 Sistem Penggajian**

Menurut Hariandja dalam Kadarisman (2014:316) gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pegawai yang memberikan sumbangan dalam kedudukannya di sebuah organisasi, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari

keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Wungu dan Brotoharsojo dalam Kadarisman (2014:318) mengartikan “gaji adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang pembagiannya didasarkan kepada berat ringannya tugas jabatan yang diduduki oleh pegawai.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaji adalah suatu imbalan berupa uang sebagai tanda balas jasa atas apa yang dikerjakan untuk perusahaan atau organisasi.

Dalam hal sistem penggajian Perusahaan terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut (Mulyadi, 2001 : 385)

1. Prosedur Pencatatan Waktu Hadir

Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi atau pabrik.

2. Prosedur Pembuatan Daftar Gaji

Dalam prosedur ini fungsi pembuatan daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.

3. Prosedur Distribusi Biaya gaji

Dalam prosedur distribusi biaya gaji dan biaya tenaga kerja didistribusikan

kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.

#### 4. Prosedur Pembayaran gaji

Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas pada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi keuangan kemudian menggunakan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji.

### 2.3 Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya, efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Poerwanti dan Suwandayani (2020) Keefektifan mengacu pada

pengertian sejauh mana rencana yang disusun telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa keefektifan adalah tingkat keberhasilan suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun instansi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Suatu tindakan dikatakan efektif jika tindakan itu mampu mencapai perencanaan yang telah ditentukan. Sebaliknya, usaha itu tidak efektif jika usaha itu makin jauh dengan apa yang direncanakan.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja suatu organisasi yang memberikan pelayanan yaitu :

#### 1. Waktu

Cepat tidaknya satuan kerja dalam suatu organisasi memberikan pelayanan kepada pelanggannya jelas merupakan suatu kriteria. Hanya saja penggunaan ukuran tentang cepat tidaknya pelayanan itu diberikan berbeda dari satu orang ke orang lain. Artinya, seorang mungkin saja merasa ditinjau dari segi waktu, pelayanan yang di terimanya sudah memuaskan, sedangkan bagi orang lain waktu yang sama mungkin masih dirasakan terlalu lama

#### 2. Kecermatan

Kecermatan dapat dijadikan ukuran. Dalam hal ini yang di maksud ialah misalnya jika menurut pengalaman pelanggan yang diterimanya kurang dari yang seharusnya, maka ia akan cenderung memberikan nilai yang tidak

terlalu tinggi terhadap efisiensi dan efektivitas kerja dari pihak yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepadanya meskipun diberikan dalam waktu singkat.

### 3. Gaya pemberian layanan

Gaya pemberian layanan merupakan salah satu ukuran lain yang didapat dan biasanyadigunakan dalam mengukur efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi. Yang dimaksud dengan gaya disini adalah cara dan kebiasaan para wartawan dalam suatu organisasi memberikan jasa kepada pelanggannya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan saya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, dan mengkaji beberapa literatur berupa jurnal, buku, e-book, artikel, web resmi, dan sumber-sumber penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya dengan topik penelitian yang berhubungan dengan topik ini, yang mampu menunjang kevalidan data dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan yang telah diutarakan oleh peneliti maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang merupakan analisis dengan cara menjelaskan dan mendeskripsikan tentang data yang telah terkumpul dan sumber-sumber dengan tujuan tidak membuat kesimpulan yang berlaku.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dibahas oleh peneliti berhubungan dengan Analisis Efektivitas Aplikasi Simgaji Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 1 Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50248.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut (Di et al., 2021) jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, atau gambar. Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap.

#### **3.3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder :

Menurut (Arwin, dkk 2019) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi : peraturan daerah, peraturan walikota, dokumen, dan arsip, dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu, dalam bentuk uraian, seperti nama satuan kerja perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi, seta visi dan misi. Menggunakan studi kepustakaan melalui proses mengumpulkan, mencatat, dan mempelajari literatur terkait dengan yang sudah ada.

a. Metode Dokumentasi

Digunakan untuk mengamati subjek penelitian dari lingkungannya untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya, produk-produk dan dokumen yang dibutuhkan terkait Analisis Efektivitas Aplikasi Simgaji Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah. Informasi tersebut penulis dapatkan melalui berkas-berkas tentang BAPENDA mengenai sejarah, selain itu terdapat informasi yang didapatkan melalui situs resmi. Dokumen-dokumen tersebut berupa Peraturan Perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), jurnal, website BAPENDA Provinsi Jawa Tengah, serta artikel-artikel yang terkait dengan topik pembahasan.

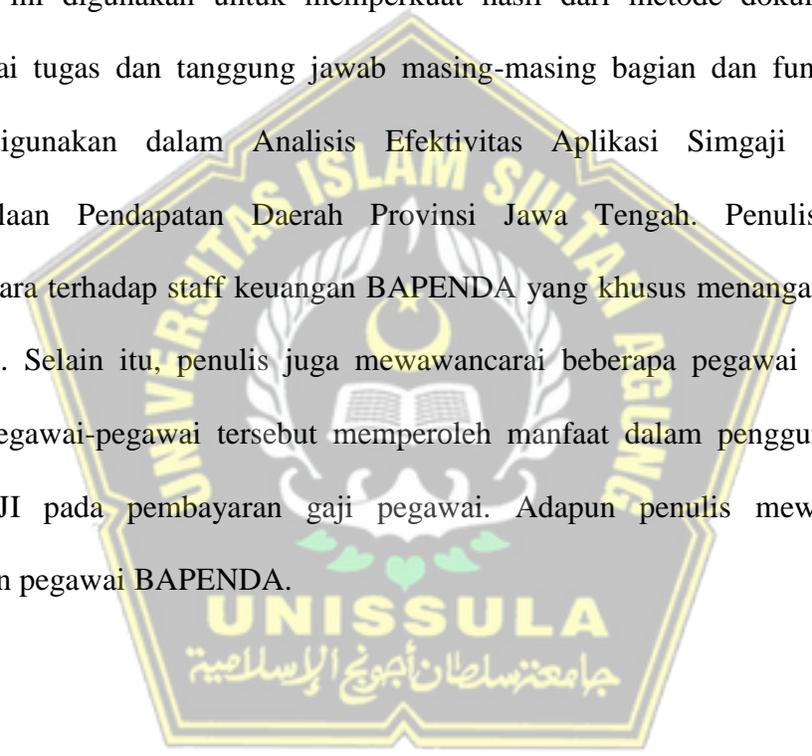
b. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya di bagian sub bagian keuangan terutama pada staff penggajian. Dalam hal ini penulis mengamati lingkungan kerja, apa saja yang dikerjakan oleh BAPENDA

secara langsung terutama pada sub bagian penggajian pegawai atau sub keuangan. Observasi dilakukan untuk mengamati objek penelitian langsung dimana dalam pelaksanaannya penulis melakukan observasi langsung guna keterkaitan dengan analisis efektivitas simgaji pada BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.

### c. Metode Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperkuat hasil dari metode dokumentasi yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dan fungsi dokumen yang digunakan dalam Analisis Efektivitas Aplikasi Simgaji Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Penulis melakukan wawancara terhadap staff keuangan BAPENDA yang khusus menangani penggajian pegawai. Selain itu, penulis juga mewawancarai beberapa pegawai lainnya yang mana pegawai-pegawai tersebut memperoleh manfaat dalam penggunaan aplikasi SIMGAJI pada pembayaran gaji pegawai. Adapun penulis mewawancarai 3 informan pegawai BAPENDA.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pembahasan

##### 4.1.1 Cara Kerja Aplikasi SIMGAJI

Sebagai perwujudan dari kemajuan teknologi yang memudahkan instansi dalam pengurusan penggajian, aplikasi SIMGAJI memiliki tampilan yang mudah di pahami dan dioperasikan. Berikut ini tampilan dari aplikasi SIMGAJI BAPENDA Jawa Tengah:

1. Layar tampilan menu utama simgaji



**Gambar 4.1 Menu utama simgaji**

Gambar di atas merupakan tampilan awal saat membuka SIMGAJI. Untuk melanjutkan aktivitas, maka pengguna/staff terkait harus login dengan memasukkan username dan password khusus.

## 2. Tampilan *homepage* SIMGAJI



Badan Kepegawaian Daerah  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**Gambar 4.2 Tampilan setelah login**

Setelah login, tampilan menu akan menjadi seperti gambar 4.2. Pada halaman ini terdapat beberapa menu yang dapat dioperasikan sesuai kebutuhan yang meliputi menu pegawai, pegawai PPPK, cetak, struk dan manual.

## 3. Menu Pegawai

Informasi utama dapat diakses pada menu pegawai yang di dalamnya akan ditampilkan informasi mengenai Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), nama, golongan, serta lokasi kerja. Lokasi kerja disini menunjukkan lokasi penempatan daerah dari setiap pegawai di seluruh wilayah Jawa Tengah. Gambar 4.3. berikut merupakan visualisasi dari menu pegawai.

No	Aksi	NIP	Nama	Gol	Lokasi Kerja	Lokasi Gaji
1		1970212018011001	A. MOCHSOS	1D	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. BOJONEgara
2		1977102018011001	A. TEGUH SANTONDI S.Kom	1E C	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. SEMARANG LUMAJAR
3		1969081975122001	AA. SYAH KAMUNASAFUL DE	1D	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. JEPARA
4		1989110301911001	ABGA AZIZ WILUM FALDI SE	1E C	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KOTA SEMARANG
5		1902060200121001	ABDUL AZIZ S. STP, M. Ed.	1VA	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. PURWOREJO
6		1907121983121001	ABDUL AZIZ DE	1D	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. KLATEN
7		190208198911001	ABDUL WAHID SE	1D	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. SEMARANG
8		1970041200011001	ACHMAD ALI	1E	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH
9		1901041980011001	ACHMAD IMROQIL HADRI SE	1D	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. SEMARANG
10		1909191989011001	ACHMAD MUBLAHAR, SH, SH	1VA	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. SUKSES
11		1909191989011001	ACHMAD ROZTOFIN DON PRYAKH, SH	1E C	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KOTA MANGLADARA
12		1900030800110101	ACHMAD RUSDI	1E	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. TEGAL (TAGER)
13		1909031988011001	ACHMAD SAMUEL DE	1D	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. KUDUS
14		1902050201111001	ACHMAD SYAHRIL SH	1E	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. PURWOREJO
15		190410281983011001	ACHMAD SUBHANO	1A	BAGAN PENDELOLA PENDAPATAN DAERAH	BAPENDA PROV JATENG UPD KAB. PURWOREJO

**Gambar 4.3 Tampilan menu pegawai**

#### 4. Menu Cetak

Pada menu cetak, aplikasi SIMGAJI menampilkan rekap informasi daftar gaji untuk kebutuhan pengecekan atau preview. Pengecekan dilakukan untuk meminimalisir kekeliruan yang mungkin ditimbulkan. Pada menu cetak ini, pengguna juga dapat mengakses data daftar gaji bulan-bulan sebelumnya pada BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.

Menu cetak juga menyajikan informasi golongan, gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan lainnya, potongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pensiun, dan lain-lain, potongan Pajak Penghasilan PPh kemudian jumlah penghasilan bersih yang dibayarkan pada bulan tersebut per pegawai pada BAPENDA Provinsi Jawa Tengah.

**CETAK**

Jenis: DAFTAR GAJI

Periode: September 2023

Lokasi Start: 38000000 - BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Lokasi End: Pilih Lokasi

NIP:

**Cetak**

**Gambar 4.4 Menu cetak**

REKAPITULASI GAJI DAN BUKU GIBAK

DAFTAR NAMA DAN JUMLAH GIBAK PEREKOR

KODE LOKASI : 38000000 - BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

MASUK BULAN : SEPTEMBER 2023

No	NAMA	JABATAN	Gaji Pokok	Gaji Tunjangan	Gaji Lainnya	Total	Catatan
1	1. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
2	2. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
3	3. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
4	4. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
5	5. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
6	6. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
7	7. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
8	8. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
9	9. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	
10	10. DR. H. H. H. H.	DR. H. H. H. H.	1.111	1.111	1.111	3.333	

UNISSULA  
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

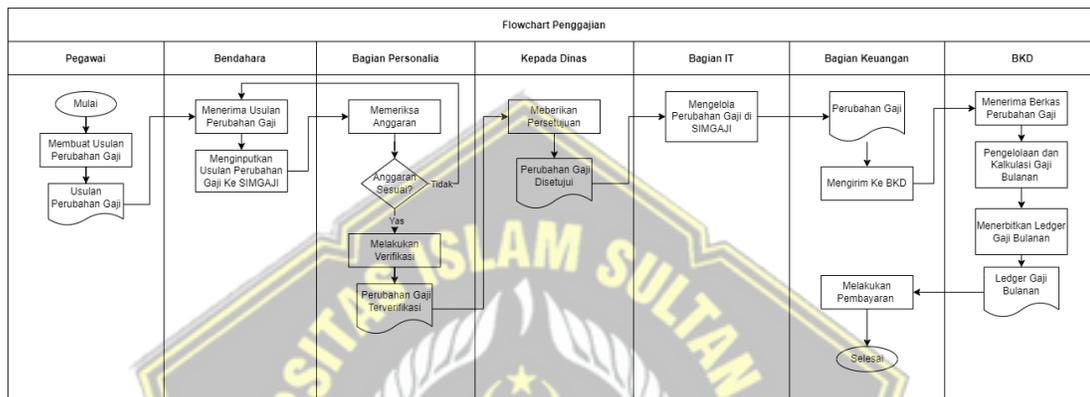
**Gambar 4.5 Tampilan slip gaji pada salah satu pilihan dalam menu cetak**

#### 4.1.2 Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan staff sub bagian keuangan yang menangani khusus pada penggajian pegawai. Pada kesempatan tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian narasumber selaku

staf sub keuangan bagian penggajian menanggapi atas pertanyaan yang diberikan, merujuk kepada pembahasan mengenai prosedur penggajian staf tersebut menjelaskan bagaimana alur pengajuan penggajian hingga gaji sampai ke tangan pegawai.

Adapun alur prosedur penggajian pada aplikasi SIMGAJI sebagai berikut:



**Gambar 4.6 Flowchart sistem penggajian**

5. Pegawai mengajukan usulan perubahan gaji kepada bendahara gaji;
6. Bendahara Gaji Menerima Usulan Perubahan Gaji dari Pegawai;
7. Bendahara gaji memasukkan usulan perubahan gaji ke dalam sistem yang telah disediakan;
8. Bagian personalia melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan gaji yang telah dimasukkan;
9. Bagian personalia memeriksa ketersediaan anggaran untuk menutupi perubahan gaji yang diajukan;

10. Usulan perubahan gaji disetujui oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang sebelum diproses lebih lanjut;
11. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerbitkan ledger gaji bulanan; dan
12. Setelah ledger gaji bulanan diterbitkan, bagian keuangan bertanggung jawab atas pembayaran gaji kepada pegawai sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam ledger tersebut.

Selain itu, staf sub keuangan bagian penggajian memberikan pandangannya mengenai efektifitas penggunaan aplikasi SIMGAJI. Menurut narasumber penggunaan aplikasi SIMGAJI dalam penggajian lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sebelumnya, BAPENDA masih menggunakan mode manual dalam sistem penggajian pegawainya. Sebagaimana kelemahan sistem manual pada umumnya, berbagai masalah efisiensi dan efektifitas juga dihadapi oleh BAPENDA. Diantaranya, dalam hal pegawai pensiun atau yang telah berhenti menerima gaji, BAPENDA perlu mengajukan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pengajuan dan pembuatan SKPP yang masih manual pada masa tersebut BAPENDA mengalami kesulitan dalam men-tracing progress pembuatan SKPP tersebut. Selama SKPP belum diterbitkan, pegawai masih menerima pembayaran sehingga mengakibatkan pembayaran yang diterima tersebut harus dikembalikan ke kas negara karena pada dasarnya status kepegawaian mereka telah berubah. Dalam mode manual, juga sering ditemukan

adanya perbedaan data penggajian antara SK Pensiun maupun Mutasi dengan buku besar gaji yang diterbitkan oleh BKD. Diperlukan prosedur yang panjang juga untuk input data gaji sehingga kurang efektif karena harus mendatangi langsung setiap UPPD se-Jawa Tengah untuk mengupdate data gaji. Selain ketiga masalah tersebut, masih banyak masalah lainnya yang terjadi sebagai dampak penerapan mode manual terutama berkaitan dengan pembaruan (*updating*) data. Narasumber 1 yakni staf sub keuangan bagian penggajian mengutarakan

*“Ketika sistem penggajian masih manual, kita harus satu persatu mengumpulkan data kemudian menyerahkan ke BKD.” (Narasumber 1)*

Hal-hal tersebut pada akhirnya telah menghambat kinerja BAPENDA dalam proses penggajian pegawai. Maka dari itu, penerapan aplikasi SIMGAJI sebagai bagian dari respon yang baik pada instansi pemerintahan atas kemajuan teknologi menjadi solusi yang tepat pada masa kini untuk masalah-masalah dalam sistem penggajian manual. Oleh karenanya penggunaan aplikasi SIMGAJI dirasa efektif karena semua sudah terkoneksi via aplikasi sehingga tidak perlu adanya kirim-kirim usulan ke BKD dan sudah *paperless*.

Wawancara dilakukan juga kepada beberapa pegawai BAPENDA Provinsi Jawa Tengah hal yang sama juga dirasakan, salah satunya disampaikan oleh narasumber 3:

*“Selama penggunaan aplikasi simgaji ini tidak pernah adanya keterlambatan pembayaran gaji, jika ada hal yang perlu di update terkait misalnya status menikah, tunjangan anak, bisa langsung diproses dengan cepat”.*

Hal tersebut semakin memperkuat argumen sistem sudah bisa dikatakan efektif sehingga tidak ada keterlambatan dalam penggajian maupun salah input sebab dalam database aplikasi SIMGAJI sudah terkoneksi dengan data para pegawai. Oleh karena itu, mengutarakan pendapat melalui sudut pandang penulis implementasi penggunaan aplikasi SIMGAJI dalam penggajian pegawai BAPENDA sudah efektif hal ini didasarkan dengan membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

#### **4.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Aplikasi SIMGAJI**

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penerapan sistem penggajian melalui aplikasi SIMGAJI, sebagai berikut :

A. Kelebihan aplikasi SIMGAJI ini, antara lain:

Penggunaan SIMGAJI mempermudah dalam proses penggajian ataupun pengusulan- usulan perubahan gaji data-data yang berkaitan dengan pengajuan tunjangan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain dapat diajukan langsung melalui aplikasi simgaji sehingga dapat memberikan efisiensi waktu serta tenaga. Hal tersebut selaras dengan pernyataan pegawai yang merasa sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMGAJI.

Selain itu SIMGAJI memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan proses pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji lebih cepat, sehingga tercapainya keakuratan data dalam pembuatan SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku badan yang bertanggungjawab terhadap kuasa bendahara negara (BUN).

*“Lebih efektif karena tidak perlu melakukan pengajuan usul-usulan karena sudah terkoneksi via aplikasi SIMGAJI”.* (Narasumber 1)

B. Adapun kelemahan dalam aplikasi SIMGAJI meliputi :

Seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan staf penggajian bahwa aplikasi SIMGAJI belum mampu terupdate secara otomatis. Masalah ini juga diikuti dengan minimnya kesadaran pegawai untuk melakukan pengecekan data individu mereka dalam sistem.

*“Sayangnya masih belum bisa terupdate secara otomatis. Sehingga diperlukan kesadaran pegawai akan kewajibannya”.* (Narasumber 1)

Salah satu contoh terkait *updating* data ini yaitu pada kasus si pemilik akun simgaji tersebut tidak mengupdate atau kurang teliti dalam melihat akunnya sendiri, dimana seharusnya anak yang sudah dewasa (bekerja) sudah tidak mendapatkan tunjangan anak. Namun si pemilik akun tidak mengupdate

sehingga sampai sekarang anaknya masih mendapatkan tunjangan anak dan ketika si pemilik akun tersebut sudah pensiun maka harus mengembalikan dana yang tertagih. Hal ini menjadikan beberapa kesalahan informasi terjadi dan timbulkan komplain pada penerapan SIMGAJI.

#### **4.2 Hasil Pengamatan Mengenai Efektivitas Penggunaan SIMGAJI**

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis lakukan selama kegiatan magang di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah di bagian Sub Keuangan selama selang waktu kurang lebih 2 bulan, ada beberapa kegiatan yang diikuti dan dilakukan, diantaranya adalah mengecek laporan penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran, menyesuaikan surat pajak, memasukkan daftar gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), serta mempelajari terkait penggunaan aplikasi SIMGAJI berkenaan pada prosedur penggajian pegawai Bapenda. Namun, dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan pada sistem penggajian pegawai melalui aplikasi SIMGAJI yaitu dalam analisis efektivitas aplikasi SIMGAJI pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Karena dengan penggunaan sistem aplikasi ini diklaim sudah memberikan efektivitas dalam prosedur penggajian pegawai.

Oleh karenanya, merujuk pada penerapannya, aplikasi SIMGAJI BAPENDA dapat disimpulkan cukup efektif sebagaimana beberapa kelebihan yang dihasilkan dalam pemanfaatan SIMGAJI seperti efisiensi waktu dan tenaga, serta prosedur yang terotomatisasi. Dari sisi waktu pada aplikasi SIMGAJI yaitu efektif sebagaimana sistem SIMGAJI dirancang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah berdasarkan tugas, pokok, dan fungsi. Terkait efektivitas dari sisi tenaga dan prosedur seperti mulai dari perhitungan, penambahan, pengurangan, perumusan serta tabel dalam SIMGAJI yang dilakukan melalui mesin mengurangi beban pekerjaan berulang untuktahapan-tahapan teknis..

Aplikasi SIMGAJI memiliki berbagai fitur untuk memfasilitasi berbagai prosedur dalam penggajian BAPENDA. Dengan Keunggulannya, SIMGAJI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penggajian. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah beberapa manfaat yang dihasilkan dari efektifitas aplikasi SIMGAJI:

1. Mempermudah proses penggajian dengan penghitungan gaji secara otomatis dengan hasil yang lebih akurat sehingga menghindari kesalahan atas penghitungan yang dilakukan secara manual.
2. Memastikan transparansi dan integritas data penggajian dengan jaminan bahwa data yang diterima dan disimpan adalah data yang valid dan akurat.

3. Menghemat ruang penyimpanan data penggajian secara fisik karena data penggajian dapat disimpan dalam ruang penyimpanan digital.
4. Mempermudah pembuatan laporan dan analisis data penggajian sehingga memastikan bahwa laporan dan analisis dapat diterima dan disimpan secara cepat dan akurat.
5. Memastikan keamanan data penggajian dengan memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dihapus tanpa izin pihak yang berwenang.

Namun tidak lepas dari keunggulan masih ada kekurangan yang perlu diadakannya sosialisasi secara menyeluruh kepada pegawai dalam pemanfaatan teknologi SIMGAJI. Bagaimanapun, sebagai mesin, SIMGAJI memerlukan input informasi yang akan diproses melalui mesin. Penginputan informasi tetap membutuhkan kapabilitas pegawai dengan pemahamannya dalam memisahkan informasi yang dibutuhkan dan tidak. Dalam hal ini, data pegawai yang dinamis atau sering mengalami perubahan mungkin tidak secara otomatis ada dalam sistem. Pada kondisi lain, bisa jadi data pembaruan pegawai ada dalam sistem yang lain yang tidak disinkronisasi dengan SIMGAJI sehingga tetap peran pegawai secara individu masih dibutuhkan untuk efektivitas penerapan aplikasi SIMGAJI yang sebagaimana tujuan penggunaannya.

Penggunaan teknologi dalam aktivitas manusia dapat mempermudah banyak hal. Namun, kesiapan manusia sebagai pengguna juga harus diperhatikan. Dalam kasus penerapan SIMGAJI, pada dasarnya secara teknis dari aplikasi tidak ada kendala. Kesalahan-kesalahan yang beberapa kali terjadi lebih karena input informasi yang belum akurat. Ketidakakuratan tersebut disebabkan karena belum siapnya sebagian pegawai dalam mengikuti perkembangan dan perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Meskipun demikian, Aplikasi SIMGAJI masih memungkinkan untuk lebih ditingkatkan kecanggihannya dan fungsinya terkait dengan sinkronisasi data dengan sistem yang lain. Dengan demikian, diharapkan kendala karena human error dapat diminimalisir dengan data yang tersinkronisasi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan pembahasan mengenai Analisis Efektifitas Aplikasi SIMGAJI Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penggunaan aplikasi SIMGAJI dalam sistem penggajian melalui pada BAPENDA Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan efektif, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala yakni aplikasi SIMGAJI belum bisa mengupdate secara otomatis sehingga masih harus mengupdate secara manual serpeti perubahan status pernikahan dan lain sebagainya.
2. Penggunaan SIMGAJI mempermudah dalam proses penggajian ataupun pengusulan-usulan perubahan gaji data-data yang berkaitan dengan pengajuan tunjangan, kenaikan gaji berkala, dan lain-lain dapat karena prosedur dapat diajukan langsung melalui aplikasi simgaji secara digital sehingga dapat memberikan efisiensi waktu serta tenaga.
3. Kendala kesiapan SDM dalam pemanfaatan aplikasi SIMGAJI masih perlu diatasi, misalnya dengan diadakannya sosialisasi tentang pentingnya kesadaran mengupdate data pribadi dan mekanisme-

mekanisme seperti pengiputan data pegawai seta pengingatan secara berkala untuk melakukan pembaruan data sehingga kesalahan informasi dapat diminimalisir.

4. Aplikasi SIMGAJI masih dapat ditingkatkan terutama berkaitan dengan sinkronisasi data pada aplikasi SMGAJI dengan database pusat.

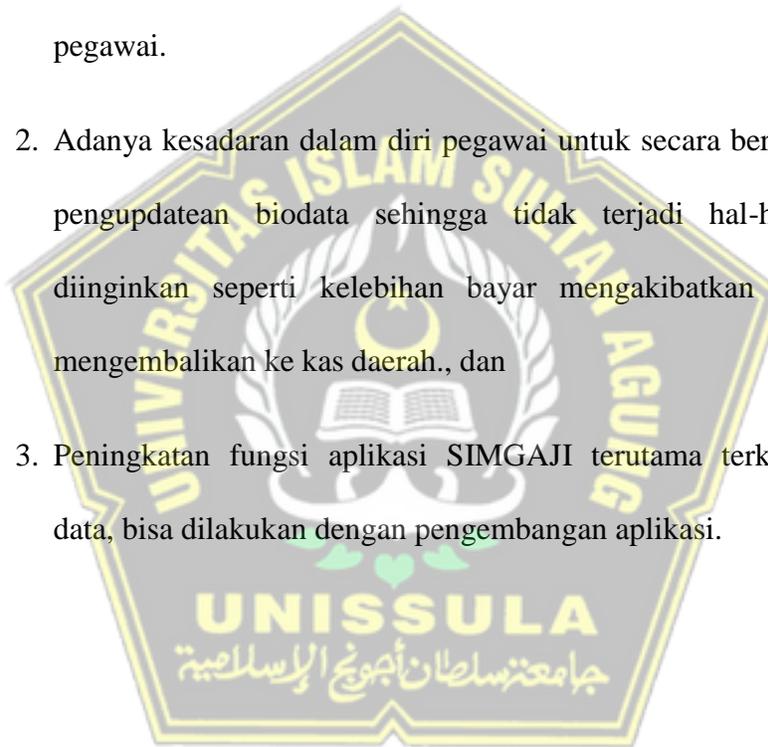
## 5.2 Keterbatasan

Tugas akhir ini dibuat sesuai buku pedoman penyusunan laporan tugas akhir. Keterbatasan dalam penulisan laporan terjadi berkaitan dengan akses yang terbatas penulis terhadap sistem informasi BAPENDA, dalam hal ini SIMGAJI. Sebagai mahasiswa magang, penulis tidak memiliki akses penuh untuk mengeksplorasi sistem kepegawaian yang ada di SIMGAJI. Namun, dalam kasus tertentu ketika diminta mengakses aplikasinya penulis dapat mengeksplorasi aplikasi SIMGAJI. Namun penulis dapat menggunakan SIMGAJI sebatas pengoperasiannya secara teknis dalam hal pengecekan data gaji yang telah diinput dan akan didistribusikan dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, laporan ini sangat bergantung pada informasi dari para narasumber sebagai pengguna yang menilai apakah penerapan SIMGAJI sudah sesuai dengan yang diharapkan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait peningkatan efektifitas aplikasi SIMGAJI, adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan untuk pegawai sehingga pegawai mampu mandiri dalam mengoperasikan, hal ini juga dapat menambah soft skill pegawai.
2. Adanya kesadaran dalam diri pegawai untuk secara berkala melakukan pengupdatean biodata sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kelebihan bayar mengakibatkan pegawai harus mengembalikan ke kas daerah., dan
3. Peningkatan fungsi aplikasi SIMGAJI terutama terkait sinkronisasi data, bisa dilakukan dengan pengembangan aplikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Novita, L. (2014). *Prosedur Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwates Jember*. Universitas Jember.
- Nur Wahidah, A. (2021). *Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS (SIM GAJI) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Suraya, L. S., Iramadani, E. Z., Pratama, F. A. A., & Muzdalifah, L. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang*. (Doctoral dissertation, <https://repository.stiedewantara.ac.id>).
- Silalahi, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Elsa Adps Di Bandar Udara Hang Nadim Batam. *Computer Based Information System Journal*, 2(2).
- Erawati, I., Darwis, M., Nasrullah, M., & Makassar, U. N. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13.
- Nursam, N. (2017). Manajemen kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2).
- SAPUTRI, A. R. E. (2014). *SISTEM DAN PROSEDUR PENGGAJIAN PEGAWAI DI DINAS PENDAPATAN UPT SURABAYA SELATAN* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- <https://bapenda.jatengprov.go.id/>
- <https://www.kompasiana.com/hndrktry/5a77131f5e13736195794562/pengertian-upah-menurut-para-ahli-ekonomi>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Kartu Bimbingan

<b>KARTU BIMBINGAN</b> <b>TUGAS AKHIR</b>				
Nama : Salmah Khaerunisa NIM : 49402100046 JUDUL : Analisis Efektivitas Aplikasi SIMGAJI Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah				
No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Media	Tanda Tangan Pembimbing
1	26/12/2023	Pengajuan dan acc judul	Gmeet	<i>Mush</i>
2	03/02/2024	Pengajuan Bab 1	Gmeet	<i>Mush</i>
3	12/02/2024	Pengajuan Revisi Bab 1	Gmeet	<i>Mush</i>
4	19/02/2024	Pengajuan Bab 2 dan Bab 3	Whats App	<i>Mush</i>
5	25/02/2024	Revisi Bab 2 dan Bab 1	Whats App	<i>Mush</i>
6	26/02/2024	Pengajuan Bab 4 dan Bab 5	Whats App	<i>Mush</i>
7	27/02/2024	ACC	Luring	<i>Mush</i>